

**PENGARUH KOMPETENSI PEGAWAI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI**

Vivi Eriani¹⁾, Zamzami²⁾, Enggar Diah, PA²⁾

¹⁾Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2018

^{2&3)}Dosen Pembimbing

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze and test the Influence of Employee Competence and Internal Control Systems Financial Report on the Quality of Local Government Batang Hari either partially or simultaneously.

The method used is the explanation Research (Explanatory Research) is research that highlights the relationship between the study variables and test hypotheses that have been formulated beforehand with the focus lies on the explanation of the relationship between variables. This study used a statistical instrument with multiple linear regression analysis to determine the level of relationship between employee competence and internal control system of the quality of financial statements.

The results of the discussions concluded that simultaneous, Competence Employees and Internal Control Systems Impact on the Quality of Financial Statements Regional Government Batang Hari. Partially, all independent variables affect the dependent variable is the Employee Competence and Internal Control Systems Impact on the Quality of Local Government Financial Statements Batang Hari.

Keyword: *Competence Employees, Internal Control Systems and the Quality of Financial Statements*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji Pengaruh Kompetensi Pegawai Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang Hari baik secara parsial maupun secara simultan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah Penelitian penjelasan (*Explanatory Research*) yaitu penelitian yang menyoroti hubungan antara variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya dengan fokus terletak pada penjelasan hubungan antar variabel. Dalam penelitian ini digunakan instrument statistika dengan analisis regresi linier berganda dalam menentukan tingkat hubungan yang terjadi antara kompetensi pegawai dan sistem pengendalian Internal terhadap Kualitas laporan keuangan.

Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa secara secara simultan, Kompetensi Pegawai Dan Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang Hari. Secara parsial seluruh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat yaitu Kompetensi Pegawai Dan Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang Hari.

Kata Kunci: *Kompetensi Pegawai, Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Laporan Keuangan*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Keuangan sektor publik menjadi instrumen utama untuk menciptakan akuntabilitas publik. Tujuan penyusunan laporan keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Standar Akuntansi Pemerintahan SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain: anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Laporan keuangan yang berkualitas harus dapat disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari aspek karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Penilaian terhadap kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari opini atas laporan keuangan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah satu tanda bahwa laporan keuangan dianggap sudah berkualitas adalah ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungan sistem akuntansi yang ada. Tidak pula terlepas dinamika perubahan eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan merupakan alat akuntabilitas utama pemerintah yang

juga memberikan informasi kepada pihak luar dan masyarakat mengenai sejauh mana efisiensi penggunaan sumber-sumber ekonomi organisasi tersebut. Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat (Mardiasmo, 2004:105)

Pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan akuntabilitas publik (Halim dan Damayanti, 2007: 20). Pengelolaan keuangan yang baik akan dapat dilihat dari laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas dapat digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dalam memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati *trend* antarkurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada (Harun, 2009). Salah satu kualitas laporan keuangan yang harus dicapai adalah masalah relevansi. Kata relevan mengacu kepada dampak dari informasi dan pengaruhnya kepada keputusan ekonomi pemakai laporan dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu sehingga informasi yang relevan dapat memberikan manfaat umpan balik dan prediktif. Terkadang seringkali terjadi kesalahan informasi yang pada akhirnya mengakibatkan hasil laporan yang tidak akurat.

Perubahan akuntansi berbasis kas menjadi akrual bukan sekedar masalah teknis pencatatan transaksi dan menyajikan laporan keuangan, tetapi membutuhkan kebijakan akuntansi (*accounting policy*), perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (*accounting treatment*), pilihan akuntansi (*accounting choice*), serta mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada. Oleh karenanya, proses pelaporan keuangan pemerintah harus dikerjakan oleh SDM yang memiliki kompetensi agar mampu menyusun dan menyajikan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) yang berkualitas.

Kemudian untuk menilai ketepatan pelaksanaan kebijakan organisasi dan melakukan tindakan koreksi jika terdapat penyimpangan maka diperlukan peran pengawas (audit intern) agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Mencermati topik pengawasan secara luas, sistem pengawasan dibangun berdasarkan pendekatan kelembagaan internal dan eksternal, yaitu system pemeriksaan ekstern pemerintah dan sistem pengawasan intern pemerintah. Meskipun keberadaan lembaga tersebut cukup beragam, sampai saat ini peranan masing-masing lembaga tersebut belum optimal.

Selain kesesuaian kualitas laporan keuangan dengan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendalian Intern (SPI) juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam menyusun

laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur SPI terdiri atas (1) lingkungan pengendalian; (2) analisis resiko; (3) kegiatan pengendalian; (4) informasi dan komunikasi; dan (5) pemantauan. Untuk mencapai asas umum pengelolaan keuangan daerah maka diperlukan pengendalian atas kegiatan yang dilakukan. Pengendalian dilaksanakan dengan berpedoman kepada sistem pengendalian intern pemerintah, dimana fungsi sistem pengendalian intern adalah sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektifitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan suatu organisasi dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektifitas dan perkembangan teknologi serta dilakukan secara komprehensif.

Mengingat perkembangan kualitas laporan keuangan yang masih terlihat lambat, maka peningkatan kompetensi SDM dan peran pengawas keuangan serta efektivitas pengendalian intern pemerintah menjadi krusial. Terkait masalah pengendalian, pemerintah telah mengeluarkan PP No. 60 tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP). Dengan mengoptimalkan SPIP diharapkan pengendalian intern semakin efektif sehingga dapat memediasi dalam mengatasi permasalahan rendahnya kualitas informasi keuangan. Dengan terbitnya PP No.60 tahun 2008, pengawas intern memiliki peran baru yaitu: Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara, pembinaan penyelenggaraan SPIP, dan *reviu* laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dengan paradigma baru ini, tugas pengawas tidak sekedar mengawasi pengelolaan keuangan tetapi bersinergi dengan mitra kerja dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Upaya peningkatan kualitas LKPD juga sejalan dengan Inpres No. 4 Tahun 2011, tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara. Dimana salah satu instruksinya, BPKP diberi tugas melakukan asistensi kepada kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman bagi pejabat pemerintah pusat/ daerah dalam pengelolaan keuangan Negara, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola. Pemeriksaan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan kinerja bertujuan untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memuat temuan pemeriksaan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau

lebih permasalahan, yaitu berupa kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan/ atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan ini dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, atau ketidakefektifan. Ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara dan kekurangan penerimaan merupakan permasalahan yang berdampak finansial, sedangkan penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidak-efektifan merupakan permasalahan yang tidak memiliki dampak finansial. Secara lebih terperinci, BPK mengungkapkan 10.198 temuan yang memuat 15.568 permasalahan, meliputi 7.661 (49%) kelemahan SPI dan 7.907 (51%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp44,68 triliun. (Sumber : IKHTISAR Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester I Tahun 2016, BPK RI)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Herawaty (2014) Raina dan Susilawati (2012), Sinarwati, dkk (2014), Ariesta (2013) dan Armando (2013), Darmawan, dkk (2014) menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil Drama (2014) dan Inapty, dkk (2015) bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah kompetensi aparatur atau pegawai. Wiley (2002) dalam Ni Made Sukmaningrum (2012) mendefinisikan sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Pada tahun 2015, seluruh pemda telah menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan peraturan tersebut, laporan keuangan pemda yang semula terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), bertambah 3 laporan yaitu Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Sebagai salah satu kabupaten yang memperoleh opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) nya, upaya pemerintahan kabupaten Batang Hari untuk terus meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangannya yang ditunjukkan oleh peningkatan

kualitas pelaporan keuangan tersebut dengan opini WTP pada tahun 2012 dan 2013, kemudian menurun menjadi opini WDP tahun 2014, dan sekarang memperoleh kembali opini WTP atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2015 yang terima oleh Bupati Batang Hari Syahirsyah bersama Ketua DPRD Batang Hari M. Mahdan dari Kepala BPK RI Perwakilan Jambi yaitu Ibu Elizar pada hari jum'at tanggal 27 Mei 2016 (Sumber Jambi Update, Co dan Siaran Pers BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi). Informasi keuangan ini tentunya akan berdampak pada kinerja pemerintah daerah kabupaten Batang Hari untuk terus mempertahankan kualitas keuangannya sebagai bukti pertanggung jawaban kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari yang tidak terlepas dari penerapan fungsi dan sistem pengendalian internal (SPI) Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari yang juga didukung oleh kemampuan aparatur atau pegawai pengelola keuangannya.

Berdasarkan uraian di atas terutama dari hasil penelitian sebestumnya yang memberikan bukti yang berragam atas hasil penelitiannya tentang faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, maka penulis terdorong melakukan penelitian lebih lanjut tentang **"Pengaruh Kompetensi Pegawai Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang Hari"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Apakah Kompetensi Pegawai Dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang Hari?
- Apakah Kompetensi Pegawai berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang Hari?
- Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang Hari?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari bukti empiris mengenai :

- Pengaruh Kompetensi Pegawai Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang Hari.
- Pengaruh Kompetensi Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang Hari.

- Pengaruh Sistem Pengendalian Internal berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang Hari.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan diatas, maka manfaat daripada penelitian ini adalah :

- Bagi peneliti, untuk menambah wawasan peneliti khususnya tentang Pengaruh Kompetensi Pegawai Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang Hari.
- Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, penelitian ini dapat sebagai bahan informasi tambahan, atau masukan dan sebagai bahan pertimbangan pejabat pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif untuk melakukan pelaporan keuangan untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.
- Bagi Akademisi, penelitian ini dapat memperkaya hasil penelitian dan referensi bagi para akademisi sebagai sarana pengembangan bidang anggaran berbasis kinerja, perencanaan program dan kegiatan.
- Sebagai tambahan informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang penyusunan anggaran khususnya anggaran sektor publik/instansi pemerintah.

2. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

Kompetensi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan dan atau sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Spencer dan Spencer (dalam Palan, 2007:6), mengemukakan bahwa kompetensi merujuk kepada karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul (superior performer) di tempat kerja. Kompetensi dapat dibentuk antara lain melalui pendidikan dan pelatihan agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai standar yang diinginkan. Sedangkan dalam sektor pemerintahan, kewenangan diberikan oleh pemerintah kepada organisasi/pejabat tertentu dalam bidang tertentu. Dengan kompetensi yang dimiliki oleh setiap pejabat pemerintah diharapkan tugas pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Dengan kecakapan, kemampuan dan kewenangan yang dimilikinya maka masyarakat harus percaya dan berharap semua urusan mereka dapat dipenuhi. Guy *et al.* (2002) dalam Sukmaningrum (2012), menyatakan bahwa kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kompetensi aparatur pemerintah daerah berarti

kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. Indikator-indikator kompetensi sebagaimana yang dikemukakan oleh Spencer dan Spencer (1993) dalam Palan (2007) meliputi : Pengetahuan, Keterampilan, Konsep diri dan nilai-nilai merujuk pada sikap dan Karakteristik pribadi merujuk pada bakat.

Menurut teori penetapan tujuan, sistem pengendalian intern proses yang dilakukan oleh manajemen dan personil lain dalam organisasi, yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa akan dapat perbaikan dalam pencapaian tujuan-tujuan: efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal juga dapat meningkatkan perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah yang digunakan sebagai alat pengambilan keputusan oleh para pemakai laporan keuangan (Udiyanti dkk, 2014). Menurut Randall (2012) dalam penelitian Udiyanti dkk (2014), unsur-unsur sistem pengendalian internal terdiri dari : Lingkungan Pengendalian, Penaksiran Resiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi.

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah pusat dan daerah harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selain itu, pemerintah pusat juga menerbitkan beberapa peraturan pemerintah (PP) menyangkut pengelolaan keuangan daerah diantaranya, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah diatur dalam PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP(Standar Akuntansi Pemerintahan).

Standar akuntansi pemerintahan yang tertuang dalam peraturan pemerintah No. 24 tahun 2005 memiliki kekuatan hukum, yang artinya baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah wajib menerapkan standar akuntansi pemerintahan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk dari pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan publik yang diamanatkan kepada pemerintah. Terdapat 11 pernyataan standar akuntansi yaitu penyajian laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, akuntansi persediaan, akuntansi investasi, akuntansi untuk asset tetap, akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, akuntansi kewajiban, pernyataan tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa dan laporan keuangan konsolidasi. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Dengan asumsi pengguna laporan keuangan memiliki pengetahuan yang memadai tentang akuntansi.

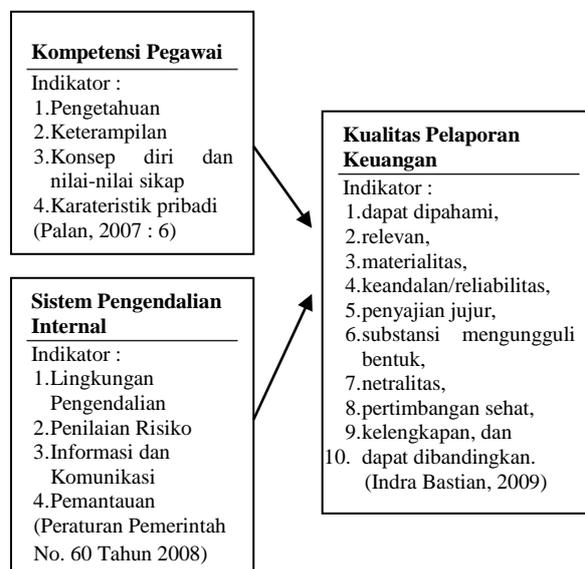
Halim Abdul (2007) menyatakan bahwa Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban

yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Indra Bastian (2009: 94-96) menyatakan bahwa kualitas keuangan dapat diukur berdasarkan karakteristik diantaranya: (1) dapat dipahami, (2) relevan, (3) materialitas, (4) keandalan/reliabilitas, (5) penyajian jujur, (6) substansi mengungguli bentuk, (7) netralitas, (8) pertimbangan sehat, (9) kelengkapan, dan (10) dapat dibandingkan.

2.2. Kerangka Pemikiran

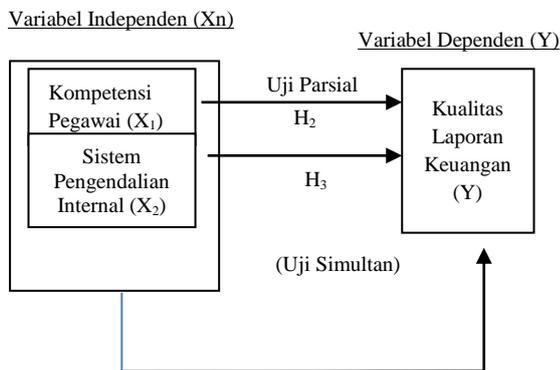
Sebagai pelaksana otonomi dan pengelola keuangan, Pemerintah Daerah harus menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan APBN/APBD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (UU No. 17/2003). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah merevisi PP No.24 Tahun 2005 dengan mengeluarkan PP no. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta untuk memfasilitasi manajemen keuangan/ aset yang lebih transparan dan akuntabel. Karakteristik kualitas informasi keuangan menurut SAP yaitu: Relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Pelaporan keuangan daerah harus memenuhi syarat-syarat kualitas laporan keuangan yang sudah ditentukan. Untuk memenuhi persyaratan atau tuntutan kualitas pelaporan keuangan tersebut maka kompetensi pegawai dan sistem pengendalian internal diharapkan dapat meningkatkan kualitas isi laporan keuangan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan daerah atau optimalisasi anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Gambar 1.
Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran dan tinjauan pustaka serta penelitian terdahulu, maka model pikiran tergambar dalam bentuk pengaruh kompetensi pegawai dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang Hari adalah sebagai berikut:

Gambar 2.
Model Penelitian



Keterangan:

→ = Mempengaruhi
H₁ s.d. H₃ = Hipotesis 1 s.d. Hipotesis 3

2.3. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Hipotesis 1 (H₁) yang berbunyi bahwa Kompetensi Pegawai (X₁) dan Sistem Pengendalian Internal (X₂) mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan (Y) di Pemerintahan Kabupaten Batang Hari.
- Hipotesis 2 (H₂) yang berbunyi bahwa Kompetensi Pegawai mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintahan Kabupaten Batang Hari.
- Hipotesis 3 (H₃) yang berbunyi bahwa Sistem Pengendalian Internal mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintahan Kabupaten Batanghari.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah mencakup seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Batang Hari yaitu sebanyak 39 SKPD yang terdiri badan, dinas, dan kantor. Sedangkan SKPD yang berupa Asisten, Sekretaris DPRD dan Daerah, Inspektorat, Sekretaris KPU, Badan, Kantor, Kecamatan-Kecamatan, Rumah Sakit, dan PDAM Tirta Batang Hari.

Sampel diambil dari keseluruhan (populasi) SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Batang Hari yaitu sebanyak 39 SKPD dengan jumlah responden yang diambil sebanyak 1 (satu) orang pimpinan SKPD

atau staf bagian keuangan yang mewakilinya, sehingga jumlah keseluruhan sampel atau responden adalah sebanyak 39 responden.

3.2. Variabel Penelitian

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Kompetensi Pegawai (X₁) dan Sistem Pengendalian Internal (X₂) di Pemerintahan Kabupaten Batanghari.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan (Y) di Pemerintahan Kabupaten Batanghari.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Sebagai pelaksana otonomi dan pengelola keuangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari harus menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan APBN/APBD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (UU No. 17/ 2003). Untuk memenuhi persyaratan atau tuntutan kualitas pelaporan keuangan tersebut maka kompetensi pegawai dan sistem pengendalian internal diharapkan dapat meningkatkan kualitas isi laporan keuangan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan daerah atau optimalisasi anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

4.1.1. Deskripsi Kompetensi Pegawai (KP)

Kompetensi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan dan atau sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Palan (2007:6) mengatakan bahwa kompetensi terdiri dari beberapa jenis karakteristik yang berbeda, yang mendorong perilaku.

Pondasi karakteristik ini terbukti dalam cara seseorang berperilaku di tempat kerja. Kompetensi adalah mengenai orang seperti apa dan apa yang dapat mereka lakukan, bukan apa yang mungkin mereka lakukan. Kompetensi ditemukan pada orang-orang yang diklasifikasikan sebagai berkinerja unggul atau efektif.

Hasil pengujian program SPSS atas jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Deskripsi Variabel Kompetensi Pegawai
Pemerintahan Kabupaten Batang Hari

	Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
KP1	39	2.00	5.00	3.5641	.13140	.82062
KP2	39	3.00	5.00	3.6154	.09449	.59007
KP3	39	3.00	5.00	3.9231	.08524	.53235
KP4	39	3.00	5.00	3.8974	.10256	.64051
KP5	39	3.00	5.00	3.9231	.07692	.48038
KP6	39	2.00	5.00	3.8718	.12283	.76707
KP7	39	3.00	5.00	3.7949	.10506	.65612
KP8	39	2.00	5.00	3.9231	.12395	.77407
KP9	39	3.00	5.00	3.8205	.10307	.64367
KP10	39	2.00	5.00	3.7692	.11882	.74203
KP11	39	3.00	5.00	3.7949	.09843	.61471
KP12	39	2.00	5.00	3.8718	.14777	.92280
KP13	39	3.00	5.00	4.1538	.13008	.81235
KP14	39	2.00	5.00	3.8462	.13008	.81235
KP15	39	2.00	5.00	3.5897	.13101	.81815
KP16	39	3.00	5.00	3.8462	.10734	.67037
Valid N (listwise)	39					
		Rata-rata		3.6003		

Keterangan:

- KP1 = Cara berpikir analitis konseptual
- KP2 = Pengetahuan akan pekerjaan
- KP3 = Kemampuan mencari informasi
- KP4 = Bersikap proaktif
- KP5 = Perhatian terhadap kualitas tugas dan pekerjaan
- KP6 = Mampu menyakinkan kepada orang lain atas kinerjanya
- KP7 = Mampu mempengaruhi orang lain
- KP8 = Berorientasi pada pengembangan kualitas orang lain
- KP9 = Memiliki kemampuan memerintah
- KP10 = Mampu memimpin
- KP11 = Dapat bekerjasama dengan kelompok atau tim kerja
- KP12 = Memiliki rasa empati yang tinggi
- KP13 = Memiliki kemampuan mengendalikan diri dengan baik
- KP14 = Memiliki rasa percaya diri yang tinggi
- KP15 = Selalu bersikap lebih luwes pada lingkungan kerja atau lebih fleksibel terhadap tugas dan pekerjaan
- KP16 = Selalu berkomitmen

Dari data diketahui bahwa secara umum persepsi responden tentang kompetensi pegawai di Pemerintahan Kabupaten Batang Hari yang dinilai oleh responden secara kualitatif adalah netral dinilai sebesar **3.6003** dibulatkan 3,60 yang berada diantara interval skor 3,22 s.d 3,82. besaran nilai kompetensi pegawai ini disebabkan oleh indikator yang membentuknya yaitu:

1. Cara berpikir analitis konseptual dengan nilai rata-rata **3.5641**
2. Pengetahuan akan pekerjaan dengan nilai rata-rata 3.6154
3. Kemampuan mencari informasi dengan nilai rata-rata 3.9231
4. Bersikap proaktif dengan nilai rata-rata 3.8974

5. Perhatian terhadap kualitas tugas dan pekerjaan dengan nilai rata-rata 3.9231
6. Mampu menyakinkan kepada orang lain atas kinerjanya nilai rata-rata 3.8718
7. Mampu mempengaruhi orang lain dengan nilai rata-rata 3.7949
8. Berorientasi pada pengembangan kualitas orang lain nilai rata-rata 3.9231
9. Memiliki kemampuan memerintah dengan nilai rata-rata 3.8205
10. Mampu memimpin dengan nilai rata-rata 3.7692
11. Dapat bekerjasama dengan kelompok atau tim kerja nilai rata-rata 3.7949
12. Memiliki rasa empati yang tinggi dengan nilai rata-rata 3.8718
13. Memiliki kemampuan mengendalikan diri dengan baik, nilai rata-rata **4.1538**
14. Memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan nilai rata-rata 3.8462
15. Selalu bersikap lebih luwes pada lingkungan kerja atau lebih fleksibel terhadap tugas dan pekerjaan dengan nilai rata-rata 3.5897
16. Selalu berkomitmen dengan nilai rata-rata 3.8462.

Dari keenambelas indikator kompetensi pegawai diketahui nilai tertinggi yang membentuk kompetensi pegawai di pemerintahan kabupaten Batang Hari adalah pegawai memiliki kemampuan mengendalikan diri dengan baik, nilai rata-rata **4.1538** atau dibulatkan menjadi 4,15. Sedangkan indikator yang dinilai paling rendah adalah cara berpikir analitis konseptual dengan nilai rata-rata **3.5641** atau dibulatkan menjadi 3,56 artinya pegawai masih kurang berpikir analitis konseptual dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas.

4.1. 2. Deskripsi Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian intern berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern. Pengembangan unsur sistem pengendalian intern perlu mempertimbangkan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan criteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komperhensif.

Hasil pengujian program SPSS atas jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Deskripsi Variabel Sistem Pengendalian Internal
Pemerintahan Kabupaten Batang Hari

	Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
SPI17	39	2,00	5,00	3,5641	.13140	.82062
SPI18	39	3,00	5,00	3,6154	.09449	.59007
SPI19	39	3,00	5,00	3,9231	.08524	.53235
SPI20	39	3,00	5,00	3,8974	.09576	.59802
SPI21	39	3,00	5,00	3,8974	.07156	.44691
SPI22	39	2,00	5,00	3,9487	.12698	.79302
SPI23	39	3,00	5,00	3,6154	.09449	.59007
SPI24	39	3,00	5,00	4,0000	.09719	.60698
SPI25	39	3,00	5,00	3,8974	.09576	.59802
SPI26	39	2,00	5,00	3,6410	.10052	.62774
SPI27	39	3,00	5,00	3,6410	.08605	.53740
SPI28	39	3,00	5,00	4,0513	.09684	.60475
SPI29	39	2,00	5,00	3,6154	.09449	.59007
SPI30	39	3,00	5,00	3,8718	.10506	.65612
SPI31	39	2,00	5,00	3,8205	.10307	.64367
SPI32	39	2,00	5,00	3,8974	.10256	.64051
SPI33	39	3,00	4,00	3,7436	.07083	.44236
SPI34	39	2,00	5,00	3,6154	.10783	.67338
SPI35	39	3,00	5,00	3,6923	.08340	.52082
SPI36	39	3,00	5,00	3,7949	.09843	.61471
SPI37	39	2,00	5,00	3,5385	.10290	.64262
SPI38	39	3,00	5,00	3,6923	.08340	.52082
SPI39	39	3,00	5,00	3,8718	.09132	.57029
SPI40	39	2,00	5,00	3,8974	.13140	.82062
SPI41	39	3,00	5,00	4,0769	.12928	.80735
SPI42	39	2,00	5,00	3,8462	.13008	.81235
SPI43	39	2,00	5,00	3,5897	.13101	.81815
SPI44	39	3,00	5,00	3,8462	.10734	.67037
Valid N (listwise)	39					
Rata-rata				3,6587		

Keterangan:

- SPI17 = Nilai integritas dan etika
- SPI18 = Komitmen terhadap kompetensi
- SPI19 = Kepemimpinan yang Kondusif
- SPI20 = Memiliki stuktur organisasi
- SPI21 = Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab
- SPI22 = Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM.
- SPI23 = Perwujudan peran aparat pengawasan intern yang efektif
- SPI24 = Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
- SPI25 = Identifikasi Risiko.
- SPI26 = Analisis Risiko.
- SPI27 = Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.
- SPI28 = Pembinaan SDM.
- SPI29 = Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.
- SPI30 = Pengendalian fisik atas asset.
- SPI31 = Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja.
- SPI32 = Pemisahan fungsi.
- SPI33 = Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.
- SPI34 = Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.
- SPI35 = Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.
- SPI36 = Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.
- SPI37 = Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.
- SPI38 = Penyediaan sarana komunikasi.
- SPI39 = Pemanfaatan berbagai bentuk sarana komunikasi.
- SPI40 = Pengelolaan sistem informasi.

- SPI41 = Pengembangan dan pembaruan sistem informasi secara terus menerus.
- SPI42 = Pengelolaan rutin pengawasan.
- SPI43 = Perbandingan rekonsiliasi dalam pelaksanaan tugas
- SPI44 = Evaluasi terpisah antara pengawasan internal dan eksternal.

Dari data diketahui bahwa secara umum Persepsi Responden tentang Sistem Pengendalian Internal di Pemerintahan Kabupaten Batang Hari dinilai oleh responden secara kualitatif adalah Netral dinilai sebesar **3.6587** dibulatkan 3,66 yang berada diantara interval skor 3,22 s.d 3,82. Besaran nilai Sistem Pengendalian Internal ini disebabkan oleh indikator yang membentuknya yaitu :

1. Nilai integritas dan etika dengan nilai rata-rata 3.5641
2. Komitmen terhadap kompetensi dengan nilai rata-rata 3.6154
3. Kepemimpinan yang Kondusif dengan nilai rata-rata 3.9231
4. Memiliki stuktur organisasi dengan nilai rata-rata 3.8974
5. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab nilai rata-rata 3.8974
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM. dengan nilai rata-rata 3.9487
7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern yang efektif nilai rata-rata 3.6154
8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait dengan nilai rata-rata 4.0000
9. Identifikasi Risiko dengan nilai rata-rata 3.8974
10. Analisis Risiko dengan nilai rata-rata 3.6410
11. Review atas kinerja instansi pemerintah bersangkutan nilai rata-rata 3.6410
12. Pembinaan SDM dengan nilai rata-rata 4.0513
13. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dengan nilai rata-rata 3.6154
14. Pengendalian fisik atas asset dengan nilai rata-rata 3.8718
15. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja nilai rata-rata 3.8205
16. Pemisahan fungsi dengan nilai rata-rata 3.8974
17. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting nilai rata-rata 3.7436
18. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu dengan nilai rata-rata 3.6154
19. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya nilai rata-rata 3.6923.

20. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya nilai rata-rata 3.7949.
21. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting dengan nilai rata-rata **3.5385**.
22. Penyediaan sarana komunikasi dengan nilai rata-rata 3.6923
23. Pemanfaatan berbagai bentuk sarana komunikasi nilai rata-rata 3.8718
24. Pengelolaan sistem informasi dengan nilai rata-rata 3.8974
25. Pengembangan dan pembaruan sistem informasi secara terus menerus dengan nilai rata-rata **4.0769**
26. Pengelolaan rutin pengawasan dengan nilai rata-rata 3.8462
27. Perbandingan rekonsiliasi dalam pelaksanaan tugas nilai rata-rata 3.5897
28. Evaluasi terpisah antara pengawasan internal dan eksternal dengan nilai rata-rata 3.8462

Dari kedua puluh delapan indikator diketahui nilai tertinggi yang membentuk Sistem Pengendalian Internal di Pemerintahan Kabupaten Batang Hari adalah Pengembangan dan pembaruan sistem informasi secara terus menerus dengan nilai rata-rata **4.0769** atau dibulatkan menjadi 4,08, sedangkan indikator yang dinilai paling rendah adalah dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting dengan nilai rata-rata **3.5385** atau dibulatkan menjadi 3,54 yang berarti bahwa sistem dokumentasi belum sepenuhnya mendukung sistem pengendalian internal dalam rangka penciptaan kalitas laporan keuangan.

4.1.3. Deskripsi Kualitas Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu: relevan, andal, dapat dipahami, dapat dibandingkan.

Hasil pengujian program SPSS atas jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.
Deskriptif Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Batang Hari

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Error	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
KLK45	39	2.00	5.00	3.5641	.13140	.82062
KLK46	39	3.00	5.00	3.6154	.09449	.59007
KLK47	39	3.00	5.00	3.9231	.08524	.53235
KLK48	39	3.00	5.00	3.8974	.09576	.59802
KLK49	39	3.00	5.00	3.8974	.07156	.44691
KLK50	39	2.00	5.00	3.9487	.12698	.79302
KLK51	39	2.00	5.00	3.8462	.14007	.87475
KLK52	39	3.00	5.00	4.0769	.12928	.80735
KLK53	39	2.00	5.00	3.8462	.13008	.81235
KLK54	39	2.00	5.00	3.5897	.13101	.81815
Valid N (listwise)	39					
Rata-rata				3.4732		

Keterangan:

- KLK45 = Laporan Keuangan dapat dipahami
- KLK46 = Laporan Keuangan relevan
- KLK47 = Laporan Keuangan bersifat materialitas
- KLK48 = Laporan Keuangan memiliki keandalan/reliabilitas
- KLK49 = Laporan Keuangan penyajiannya jujur
- KLK50 = Laporan Keuangan mengandung substansi mengungguli bentuk
- KLK51 = Laporan Keuangan bersifat netral (netralitas)
- KLK52 = Laporan Keuangan disajikan dengan pertimbangan sehat
- KLK53 = Laporan Keuangan lengkap
- KLK54 = Laporan Keuangan dapat dibandingkan.

Dari data diketahui bahwa secara umum Persepsi Responden tentang Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintahan Kabupaten Batang Hari yang dinilai oleh responden secara kualitatif adalah Netral dinilai sebesar 3.4732 dibulatkan 3,47 yang berada diantara interval skor 3,22 s.d 3,82. Besaran nilai Kualitas Laporan Keuangan ini disebabkan oleh indikator yang membentuknya yaitu :

1. Laporan Keuangan dapat dipahami dengan nilai rata-rata **3.5641**
2. Laporan Keuangan relevan dengan nilai rata-rata 3.6154
3. Laporan Keuangan bersifat materialitas dengan nilai rata-rata 3.9231
4. Laporan Keuangan memiliki keandalan/reliabilitas nilai rata-rata 3.8974
5. Laporan Keuangan penyajiannya jujur dengan nilai rata-rata 3.8974
6. Laporan Keuangan mengungguli bentuk dengan nilai rata-rata 3.9487
7. Laporan Keuangan bersifat netral (netralitas) dengan nilai rata-rata 3.8462
8. Laporan Keuangan disajikan dengan pertimbangan sehat nilai rata-rata **4.0769**

9. Laporan Keuangan lengkap dengan nilai rata-rata 3.8462

10. Laporan Keuangan dapat dibandingkan dengan nilai rata-rata 3.5897

Dari kesepuluh indikator diketahui nilai tertinggi yang membentuk Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintahan Kabupaten Batang Hari adalah Laporan Keuangan disajikan dengan pertimbangan sehat yaitu bernilai rata-rata 4.0769 dibulatkan menjadi 4,08, sedangkan indikator Kualitas Laporan Keuangan yang dinilai paling rendah adalah Laporan Keuangan dapat dipahami yaitu bernilai rata-rata 3.5641 atau dibulatkan menjadi 3,56 artinya sebagian pegawai belum memahami sajian laporan keuangan yang berkualitas.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Persamaan Regresi

Dari informasi pada deskripsi penelitian diatas selanjutnya dilakukan analisis kuantitatif dengan pendekatan metode analisis regresi yang menyantumkan data dari variabel Kompetensi Pegawai dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang Hari.

Secara keseluruhan pengaruh variabel bebas (Kompetensi Pegawai dan Sistem Pengendalian Internal) terhadap variabel terikat (Kualitas Laporan Keuangan) di Pemerintahan Kabupaten Batang Hari dapat dilihat dari hasil olahan data melalui program SPSS sebagai berikut:

Tabel 4.
Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1.189	.421		-2.826	.008		
KP_X1	.658	.174	.502	3.773	.001	.379	2.638
SPI_X2	.812	.258	.419	3.154	.003	.379	2.638

a. Dependent Variable: KLK_Y

Dari tabel diketahui bahwa bentuk persamaan regresinya adalah:

$$Y = -1,189 + 0,658 X_1 + 0,812 X_2$$

Dari persamaan hasil regresi dapat diketahui bahwa Variabel Konstanta dari regresi mempunyai koefisien sebesar 1,189 tanda negatif pada nilai konstanta ini bila diinterpretasikan secara bebas bisa mengandung arti bahwa secara rata-rata Kualitas Laporan Keuangan belum terbentuk sebesar 1,189 poin pada kondisi variabel bebas yang mempengaruhinya tidak ada.

Perubahan variabel independen Kompetensi Pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan Kualitas Laporan Keuangan yaitu bila terdapat perubahan 1 poin pada variabel Kompetensi

Pegawai akan menyebabkan perubahan pada variabel atau faktor Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,658.

Perubahan variabel independen Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan Kualitas Laporan Keuangan yaitu bila terdapat perubahan 1 poin pada variabel Sistem Pengendalian Internal akan menyebabkan perubahan pada variabel Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,812.

4.2.2. Nilai Determinasi

Nilai Determinasi ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (R^2) yang digunakan untuk mengetahui derajat pengaruh variabel bebas (Kompetensi Pegawai dan Sistem Pengendalian Internal) terhadap variabel terikat (Kualitas Laporan Keuangan) Pemerintahan Kabupaten Batang Hari berupa rumus analisis determinasi (R-Square atau R^2). Hasil pengolahan analisis regresi dengan menggunakan program SPSS diketahui koefisien determinasi berikut :

Tabel 5.
Nilai Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df 1	df2	Sig. F Change
1	.871 ^a	.759	.745	.31517	.759	56.648	2	36	.000

Nilai Determinasi (R Square atau R^2) sebesar 0,759 atau 75,90% Artinya bahwa sebesar 75,90% variabel bebas mampu menjelaskan hubungannya dengan variabel terikat sedangkan sisanya sebesar 24,10% ditentukan oleh variabel bebas lainnya diluar model.

4.2.3. Pengujian Hipotesis

4.2.3.1. Pengujian Secara Simultan (Uji-F)

Uji ini digunakan untuk menguji keberartian pengaruh dari seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil Perhitungan SPSS diketahui bahwa Signifikansi-F adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.
Hasil Uji Simultan (Uji-F)
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	11.254	2	5.627	56.648	.000 ^a
1 Residual	3.576	36	.099		
Total	14.830	38			

a. Predictors: (Constant), SPI_X2, KP_X1

b. Dependent Variable: KLK_Y

Dilihat pada tabel di atas, secara simultan diperoleh nilai Signifikansi-F (Sig-F) adalah $0,000 < 0,05$ yang berada pada daerah H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya variabel bebas (Kompetensi Pegawai dan Sistem

Pengendalian Internal) berpengaruh variabel terikat (Kualitas Laporan Keuangan) Pemerintahan Kabupaten Batang Hari. Sehingga Hipotesis 1 (H_1) yang menyatakan bahwa variabel Kompetensi Pegawai dan Sistem Pengendalian Internal mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Batang Hari secara simultan adalah terbukti atau hipotesis 1 diterima.

4.2.3.2. Pengujian Secara Parsial (Uji-t)

Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas (Kompetensi Pegawai dan Sistem Pengendalian Internal) terhadap variabel terikat (Kualitas Laporan Keuangan) Pemerintahan Kabupaten Batang Hari. Dengan menggunakan program SPSS dihasilkan output analisis regresi yang diperoleh yaitu:

Tabel 7.
Uji Hipotesis Parsial (Uji-t)

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
	B	Std. Error	Beta					
1 (Constant)	-1.189	.421		-2.826	.008			
KP_X1	.658	.174	.502	3.773	.001	.379	2.638	
SPI_X2	.812	.258	.419	3.154	.003	.379	2.638	

a. Dependent Variable: KLIK_Y

Berdasarkan tabel diatas maka model persamaan pada penelitian tentang pengaruh variabel bebas (Kompetensi Pegawai dan Sistem Pengendalian Internal) terhadap variabel terikat (Kualitas Laporan Keuangan) Pemerintahan Kabupaten Batang Hari sebagai berikut:

- Signifikansi Uji-t pada variabel Kompetensi Pegawai (X_1) adalah Sig-t 0,001 < 0,05 yang berada pada daerah H_0 ditolak dan H_a diterima atau keberadaan t-hitung 3,773 berada diatas nilai t-tabel 1,725 pada α 0,05 atau 3,773 > 1,725 yang artinya Kompetensi Pegawai berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hipotesis 2 (H_2) yang menyatakan bahwa Kompetensi Pegawai berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Batang Hari secara parsial adalah terbukti atau hipotesis 2 diterima.
- Signifikansi Uji-t pada variabel Sistem Pengendalian Internal (X_2) adalah Sig-t 0,003 angka ini < 0,05 atau angka 0,003 < 0,05 yang berada pada daerah H_0 ditolak dan H_a diterima atau keberadaan t-hitung 3,154 berada diatas nilai t-tabel 1,725 pada α 0,05 atau 3,154 > 1,725 yang artinya Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan dan positif (nilai Beta positif) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Batang Hari. Hipotesis 3 (H_3) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Batang Hari secara parsial adalah terbukti atau hipotesis 3 diterima.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari penelitian dapat disimpulkan berikut ini :

- Secara simultan kompetensi pegawai dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Batang Hari, sehingga hipotesis 1 terbukti atau diterima dengan nilai signifikansi sig-F 0,000 < 0,05 (α) dan nilai determinasi (R Square atau R^2) sebesar 0,759 atau 75,90% Artinya bahwa sebesar 75,90% variabel bebas mampu menjelaskan hubungannya dengan variabel terikat sedangkan sisanya sebesar 24,10% ditentukan oleh variabel bebas lainnya diluar model atau persamaan ini.
- Kompetensi pegawai berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Batang Hari, sehingga hipotesis 2 terbukti atau diterima dengan nilai signifikansi sig-t 0,001 < 0,05 (α).

Dari keenambelas indikator kompetensi pegawai diketahui nilai tertinggi yang membentuk kompetensi pegawai di Pemerintahan Kabupaten Batang Hari adalah pegawai memiliki kemampuan mengendalikan diri dengan baik, sedangkan indikator yang dinilai paling rendah adalah cara berpikir analitis konseptual dengan arti bahwa masih ada pegawai kurang berpikir analitis konseptual dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas.

- Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Batang Hari, sehingga hipotesis 3 terbukti atau diterima n nilai signifikansi sig-t 0,003 < 0,05 (α).

Dari kedua puluh delapan indikator diketahui nilai tertinggi yang membentuk sistem pengendalian internal di pemerintahan kabupaten Batang Hari adalah pengembangan dan pembaruan sistem informasi secara terus menerus, sedangkan indikator yang dinilai paling rendah adalah dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting yang berarti bahwa sistem dokumentasi belum sepenuhnya mendukung sistem pengendalian internal dalam rangka penciptaan kualitas laporan keuangan.

5.2. Saran

Dari hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan tersebut di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dari pembahasan ditemukan bahwa ditinjau dari kompetensinya masih ada pegawai kurang berpikir analitis konseptual dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas dan dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal masih belum sepenuhnya didukung oleh sistem dokumentasi yang baik. Berkaitan dengan masih ada pegawai kurang berpikir analitis konseptual, sebaiknya pihak manajemen perlu meningkatkan kemampuan pegawai melalui pelatihan dan pendidikan sehingga kompetensinya menunjang penciptaan penyajian laporan yang lebih berkualitas. Sedangkan untuk mengatasi sistem dokumentasi belum sepenuhnya mendukung sistem pengendalian internal, pihak pimpinan harus terus memantau dan memeriksa sistem dokumentasi yang lebih baik lagi, jika diperlukan lengkapi dengan fasilitas pendukungnya.
2. Penelitian selanjutnya hendaknya dilakukan penambahan variabel-variabel selain variabel yang telah diteliti penulis agar informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan lebih lengkap dan menyeluruh.

DAFTAR REFERENSI

- Akhmad Syarifudin . 2014. *Pengaruh Kompetensi SDM Dan Peran Audit Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemkab Kebumen)*. Jurnal Fokus Bisnis, Volume 14, No 02, Bulan Desember 2014
- Bastian, Indra. 2009. *Akuntansi Sektor Publik Indonesia*. BPFE. Yogyakarta
- Fikri. A, Inapty. A.B, Martiningsih. P.S. 2015. *Pengaruh Penerapan SAP, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating*. SNA 18 Medan.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi Keempat. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro. Semarang
- Hair, Joe F. Cristian M Ringle and Marko Sarstedt. 2011. *PLS- SEM: Indeed a Silver Bullet*. *Journal of Marketing Theory and Practice* , 139-151.
- Halens Ryanlie Ole (2014) *Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Kasus Pada Dinas PPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara)*
- Hall, J. A. 2009. *Konsep Pengendalian Internal Dalam Accounting Information System*. Jakarta: Salemba Empat.
- Heni Nurnaini H Dan Eti Sumiyati. 2014. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada Pemerintahan Daerah Di Jawa Barat)*. *Proceedings Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis (SNEB) 2014*
- Herawaty, Netty,2013, *Pengaruh Independensi, Keahlian Profesional Dan Pengalaman Auditor Internal Terhadap Efektivitas Penerapan Struktur Pengendalian Intern (Hotel Kelas Melati Di Kota Jambi) Jurnal Akuntansi*, Vol. 1, No. 2, April 2013 : 129-141
- I Made Edy Sutawan. 2015. *Pengaruh Stres Kerja, Motivasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Di Kabupaten Buleleng)*. E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Volume 3 No.1 Tahun 2015
- Indriasari Desi, 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. SNA XI. Pontianak.
- Mardiasmo. 2002. *“Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah”*. Artikel. Th.1 – No.4.
- _____. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI. Yogyakarta
- Meilani Purwanti. 2014. *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Bandung)*. Jurnal Bisnis Dan Manajemen Esensi Vol.4 No.3 Desember 2014
- Mia Oktarina, dkk. 2016. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014)*. *Journal Of Accounting*, Volume 2 No.2 Maret 2016.
- Mustafa, Santiaji, Sutrisno dan Rosidi. 2011. *Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pada SKPD pemerintah Daerah Kota Kendari*. Universitas Haluoleo, Kendari. E-Library Universitas Brawijaya / Fakultas / Accounting / Science Master Program.
- Ni Ketut Surasni,dkk. 2015. *Determinan Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap*

- Akuntabilitas Publik (Studi Empiris Pada Inspektorat Kab. Lombok Timur, Kabupaten Bima Dan Perwakilan BPKP Provinsi NTB)*
- Ni Made Sudiarianti, dkk. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah dan Implikasinya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara, Medan 16-19 September 2015
- Nur Azlina, Ira Amelia. 2014. *Pengaruh Good Governance dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan*. Jurnal Akuntansi Universitas Jember, Vol. 12 No.2 Desember 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Lembaran Negara RI Tahun 2010, No. 127. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara RI Tahun 2010, No. 123. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Peran APIP. Menpan_RB. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Negara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah. Mendagri. Jakarta.
- Sugiyanto. 2004. *Analisis Statistika Sosial*. Bayumedia Publishing. Malang
- Sugiyono. 1999. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sutrisno, 2008. *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Kendari*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Syarifudin, A 2014. *Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen)*.
- Udiyanti N.L.N.A dkk. 2014. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Pendidikan Ganesha. E-Journal Akuntansi (Vol. 2 No:1 2014)
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 66. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Winidyaningrum, C. 2009. *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten)*. Tesis Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Winidyaningrum dan Rahmawati, (2010). *Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia Terhadap Ketepatanwaktuan Dan Keterandalan Pelaporan Keuangan*. SNA XIII. Purwokerto.
- Yoana Rahayu Pratiwi, dkk. 2015. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat*. Prosiding Penelitian Spesia 2015
- Yustiono, E. 2015. *Konsepsi Kompetensi*. Diambil kembali dari STIA LAN Bandung.
- Zetra, (2009). *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah*. Universitas Gadjah Mada